

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era reformasi seperti sekarang, disetiap negara pasti membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang bisa dikenal dengan *good governance*. Indonesia perlahan-lahan sudah berkembang menuju era keterbukaan dan transparansi. Dalam era transparansi dan keterbukaan ini indonesia diharapkan akan lebih terbuka baik dalam sistem kegiatan yang dilaksanakan maupun dalam menglokasikan anggaran. kualitas laporan keuangan pemerintahan yang baik dan memerlukan sebuah prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pada saat pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi khususnya akuntansi keuangan daerah, agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna (Yusniyar & Abdullah, 2016).

Laporan keuangan pemerintah daerah sekarang ini masih terdapat yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) yang tertuju kepada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yang merupakan unsur terpenting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (LKPD). Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari 7 komponen, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta harus memenuhi karakteristik kualitatif yang menjadi prasyarat agar laporan keuangan tersebut dapat berkualitas sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penyusunannya, harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar yang berlaku yaitu SAP berbasis akrual.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor (Erlina, 2013). Perlu disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan laporan keuangan yang disusun sebagai sumber informasi bagi pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan di publikasikan harus disajikan secara wajar bebas dari salah saji material sehingga tidak menyesatkan para pengguna, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika informasi yang disajikan valid dan dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkannya (Mahmudi, 2016).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah penilaian terkait tingkat kesesuaian pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah setiap periode anggarannya. Kualitas LKPD dapat diketahui dari pendapat yang disampaikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai pihak pemeriksa dan penilai LKPD. Audit terhadap LKPD dilaksanakan setiap periode oleh BPK guna memberikan pendapatnya mengenai level kewajaran informasi pada laporan tersebut. Hasil audit tersebut dalam bentuk pendapat BPK, yakni Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Memberi Pendapat dan Tidak Wajar (Widiatmoko, 2020).

Menurut (Patra et al., 2016) menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan sebagai cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan untuk mengetahui proses pengelolaan dan penilaian kerja yang menjadi wujud pertanggungjawaban bahan untuk mengambil keputusan. Apabila laporan keuangan pemerintah tersebut dinilai kurang informatif akan menyebabkan dampak negatif seperti penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang mengelola dana publik Selain itu kualitas keputusannya kurang berkualitas (Ramadhani & Trisnawati, 2018).

Kabupaten Pringsewu merupakan bagian dari Provinsi Lampung dalam hal kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila melihat data sejak tahun 2015, LKPD lingkup Kabupaten Pringsewu terus meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun, salah satu indikatornya adalah dari opini BPK atas LKPD. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pringsewu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan ini diperoleh untuk kali ke-enam secara berturut-turut. Pemkab Pringsewu salah satu contoh yang baik terhadap tata kelola pemerintahan, baik kualitas inspektorat, kualitas SPIP maupun kualitas manajemen resiko. Apabila momentum tersebut terus terjaga, maka opini WTP atas LKPD Tahun 2021 masih dapat dipertahankan. Untuk menjaga capaian tersebut, diperlukan kerja sama dari seluruh stakeholders Akuntansi Pemerintahan baik dari Pemda sebagai penyusun laporan keuangan, organisasi perangkat daerah, instansi pengawas serta instansi terkait lainnya, mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Dalam meningkatkan kualitas LKPD, Pemkab Pringsewu dapat menyelenggarakan Workshop SPIP tentang Budaya Manajemen Risiko. Workshop SPIP ini dapat meningkatkan dan memperkuat pengendalian intern yang sistematis pada OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dengan indentifikasi risiko yang signifikan pada setiap program dan kegiatan yang ada di OPD (<https://www.pringsewukab.go.id/>).

Berdasarkan Perbup Kab. Pringsewu No. 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang mana terdapat temuan audit dilapangan mengenai kualitas LKPD yaitu pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pringsewu temuan itu berupa rehabilitasi gedung sekolah yang dikerjakan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021 diduga dikerjakan serampangan. Pekerjaan 8 lokal termasuk 1 gedung perpustakaan yang dikabarkan menelan anggaran milyaran rupiah tersebut nampak terlihat mulai kumuh, melihat hal tersebut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerak Masyarakat Analisi Kebijakan (PEMATANK) dalam waktu dekat secara resmi pihak LSM

PEMATANK segera mendalami dan membawa persoalan tersebut hingga ke kejaksaan tinggi (Kejati) Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu belum memadai yang disebabkan karena lemahnya kompetensi sumber daya manusia, dan belum memadainya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu belum menginternalisasi perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan terdapat regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual yang belum selaras dengan peraturan lainnya (<https://www.kabardesa.co.id/>, 2021).

Kabupaten Pringsewu dalam prosedur pengelolaan keuangan menggunakan sistem yang dikembangkan oleh BPKP Provinsi Lampung yaitu SIMDA Keuangan, SAKIP dan SIMDA Perencanaan. Sistem ini sudah diterapkan oleh Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2015 dan sampai dengan sekarang. Selain itu, telah dikembangkan berbagai sistem serta kerja sama antar organisasi pemerintahan guna mempermudah dalam keuangan di Kabupaten Pringsewu, salah satunya adalah bekerja sama dengan Bank Lampung untuk pembuatan kantor pelayanan kas umum daerah secara online ada beberapa aplikasi online diantaranya Kas Umum Daerah, SP2D Elektronik, Cash Management System(CMS) Pemda Online, dan Pungut Stor Pajak. Dengan sistem ini Mempermudah proses masuk dan keluar keuangan, sehingga Bupati dapat kontrol setiap saat karena sistem secara online dan Terintegrasi ke kantor pusat. Ditambahkan oleh Direktorat Pajak, Untuk kanwil Lampung sampai dengan pertengahan 2018 ini terbaik se-sumateta Itu tidak lepas dari sumbangsih pemerintah Daerah Pringsewu. Sistem keuangan yang terbaru yang diterapkan oleh Kabupaten Pringsewu adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Ini memudahkan untuk mendeteksi masalah yang terjadi perihal keuangan ([www.pringsewukab.go.id/](http://www.pringsewukab.go.id/)).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD, salah satunya yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

(Permendagri No. 21 Tahun 2011). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Selain menerapkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah juga harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material. Jadi dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (Adriani, 2018).

Faktor yang selanjutnya adalah pengelolaan keuangan daerah. Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian masyarakat dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunaannya (Adriani, 2018).

Faktor yang lainnya yaitu peran internal audit, peran audit intern merupakan salah satu kunci dalam unit pemerintahan yang memiliki keahlian untuk menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan dengan mengidentifikasi pemborosan, inefisiensi, dan kecurangan dalam anggaran serta untuk membuat rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Windasari, 2018). Peran audit intern berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersirat di dalam pasal 9 (1) UU No. 15 Tahun 2004, bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut (Septidiany, 2014) semakin tinggi pelaksanaan audit internal, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut menunjukkan jika pelaksanaan audit internal lebih baik maka dalam pelaksanaannya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Fahirah, 2021) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Cianjur). Perbedaan dalam penelitian ini adalah menambahkan variabel yaitu peran internal audit, semakin baik internal audit dalam hal ini inspektorat daerah berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah sampai dengan penyusunan laporan keuangan, maka akan semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan (Windasari, 2018). Serta mengganti objek penelitian menjadi OPD Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah ***“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu”***.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar dalam pembahasan penelitian lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu adanya ruang lingkup atau batasan penelitian, yaitu peneliti ini membahas tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Didalam penelitian ini variabel yang diambil adalah standar akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan peran audit internal. Objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD OPD Kabupaten Pringsewu?
2. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD OPD Kabupaten Pringsewu?
3. Apakah peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD OPD Kabupaten Pringsewu?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas LKPD OPD Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas LKPD OPD Kabupaten Pringsewu.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh peran audit internal terhadap kualitas LKPD OPD Kabupaten Pringsewu.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai acuan dan sumber informasi bagi penelitian yang akan datang, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.
- b. Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pengelolaan keuangan daerah, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan penelitian ini untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan PSAP.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Pembahasan dalam skripsi ini akan di sajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang uraian teori yang berkaitan dengan teori agency, kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintah, pengendalian intern

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang variable penelitian, populasi dan sampel, dan jenis sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.



#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang di lakukan. hasil-  
hasil statistic di interprestasikan dan pembahasan di kaji secara mendalam hingga  
tercapai hasil analisis dari penelitian.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil  
analisis dat, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**